

DARI MASYARAKAT BAWAH HINGGA PEJABAT

Antrean Membludak, Open House Solusi Komunikasi Publik

YOGYA (KR) - Open house kedua yang dilakukan Walikota Yogya Hasto Wardoyo pada Rabu (12/3) semakin dipadati masyarakat. Antrean bahkan sampai membludak sehingga dinilai menjadi solusi komunikasi publik.

Pertama kali open house digelar pada Rabu (5/3) lalu dan menjadi agenda rutin setiap Rabu pukul 05.30 hingga 09.00 WIB. Masyarakat dari berbagai latar belakang bisa langsung menyampaikan aspirasi atau persoalannya ke Walikota Yogya. Mereka akan diterima di ruang kerja walikota yang berada di komplek Balaikota.

"Sebenarnya sudah banyak saluran untuk menyampaikan usulan maupun persoalan. Misal bisa lewat musrenbang atau layanan UPIK yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo). Tetapi komunikasi secara langsung melalui open house saya kira sangat bagus karena bisa menjadi solusi komunikasi publik," papar Hasto, di sela menemui warga dalam open house kemarin.

Pada kesempatan kemarin, Wakil Walikota Yogya Wawan Harmawan juga turut mendampingi Hasto. Begitu pula dua staf ahli serta jajaran kepala bagian berikut para staf di Pemkot Yogya. Hasto bahkan merangkum sendiri setiap masukan dan usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Tidak kurang dari tiga puluh warga yang berebut untuk bertemu dengan Hasto. Tidak hanya dari kalangan masyarakat bawah melainkan juga para pejabat seperti Ketua DPRD DIY Nuryadi maupun Kepala Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas I Enik Sarjumanah, ikut

mengantre dalam open house kemarin.

Hasto mengaku, dirinya bersama Wawan Harmawan akan terus membudayakan komunikasi yang terbuka bersama masyarakat. Selain mampu memangkas birokrasi dalam proses audiensi, open house juga terbukti mampu memecahkan masalah secara detail.

"Bisa saja kan orang mengadu lewat UPIK atau sistem online. Tetapi jika ada yang tidak berkenan dan itu menjadi jejak digital, sehingga bagi sebagian orang menjadi tidak mau. Nah kalau ketemu langsung seperti ini semua bisa diutarakan tanpa harus takut. Kami juga bisa melakukan evaluasi jika itu menyangkut pelayanan di kami," imbuhnya.

Bahkan melalui model komunikasi dua arah dari pemegang kebijakan dengan masyarakat, imbuh Hasto, juga bisa mengeliminir aksi atau demo yang sebenarnya tidak perlu. Masyarakat yang memiliki kritikan bisa disampaikan secara langsung serta mendapatkan penjelasan lebih gamblang. Begitu pula dari sisi perasaan, ada kepuasan tersendiri jika persoalan yang dialami bisa disampaikan secara langsung serta mendapatkan penjelasan dan solusi. "Ini juga supaya orang tidak ada yang 'ngrasani' saya dan Pak Wawan di belakang. Pokoknya, sampaikan saja ke sini setiap Rabu tanpa harus mengajukan surat permohonan dan sebagainya," tandasnya.

Sementara salah satu warga yang turut mengikuti open house, Fajar Istanto, mengaku sangat apresiasi atas program tersebut. Menurutnya,



KR-Ardhi Wahdan
Walikota Yogya didampingi Wakil Walikota Yogya menerima masyarakat dalam open house di kompleks Balaikota.

open house walikota baru kali ini dilakukan. Ini membuktikan tidak ada sekat dan batasan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Fajar yang datang bersama komuni-

tasnya ini pun secara langsung menyampaikan aspirasi terkait persoalan di wilayah. Mulai dari aparaturnya yang kurang responsif dan lain sebagainya. "Kalau hal

semacam ini kami sampaikan ke aparaturnya di wilayah, jelas tidak mungkin. Tetapi jika di sini, plong rasanya karena langsung ditindaklanjuti," katanya. **(Dhi)-f**

TAK SEKADAR PEMBERSIH HARTA

Zakat Perkuat Kesejahteraan Masyarakat

YOGYA (KR) - Zakat, infak, dan sadaqah bukan sekadar kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian sosial yang dapat mempererat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DIY selama ini telah menjalankan peran strategis dalam mengelola dan menyalurkan zakat dengan amanah dan profesional. Karena Baznas telah menjadi jembatan antara para muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat).

Zakat dan shadaqah bukan hanya berdampak sosial, tetapi juga memiliki nilai spiritual. Karena zakat tidak sekadar pembersih harta tapi juga salah satu instrumen penting dalam membangun kesejahteraan umat. "Untuk itu kami berharap program distribusi zakat ini dapat terus diperluas. Dengan begitu manfaatnya bisa semakin dirasakan oleh masyarakat.



KR-Riyana Ekawati

Sugeng Purwanto menyerahkan secara simbolis program distribusi Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Baznas DIY-Pemda DIY Tahun 2025.

Pemda DIY berkomitmen untuk mendukung sinergi antara pemerintah dan Baznas dalam memperkuat kesejahteraan sosial," kata Asisten Sekda DIY Bidang Pemberdayaan SDM, Sugeng Purwanto pada penyerahan simbolis program distribusi Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Baznas DIY-Pemda DIY Tahun 2025 di Gedhong Pracimasan Kompleks Kepatihan, Rabu (12/3).

Dalam kesempatan itu Ketua Baznas DIY, Puji Astuti mengungkapkan, Baznas terus menjalankan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai koordinator zakat nasional, Baznas memiliki peran utama dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Baznas DIY tidak hanya bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan,

tetapi juga mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keagamaan. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk berkolaborasi dalam penghimpunan dan penyaluran zakat agar manfaatnya lebih luas dan merata," ungkap Puji Astuti.

Tahun 2025, menurut Puji Astuti, Program Ramadan Baznas DIY berfokus pada 8 program distribusi. Program pertama, yakni paket logistik keluarga berbagai bingkisan berupa kebutuhan bahan pangan pokok yang diprioritaskan bagi penerima manfaat. Meliputi pegawai non ASN, seperti satpam, cleaning service, pramusaji, dan tenaga bantu harian lepas lainnya di lingkungan Pemda DIY sebanyak kurang lebih 2500 paket.

Selain itu juga paket Ramadan Bahagia dengan memberikan santunan bagi 300 penerima manfaat dari berbagai latar belakang. Termasuk marbot masjid, guru honorer, serta penyandang disabilitas. "Selain beberapa hal di atas Baznas DIY telah melaksanakan pendistribusian zakat fitrah dan fidyah, di mana lebih dari 13.000 kg beras zakat fitrah. Nantinya makanan kepada masyarakat yang membutuhkan hingga menjelang Idul Fitri," jelas Puji seraya menambahkan untuk para pemudik Baznas DIY juga menyediakan Layanan Posko Mudik yang menawarkan pengamanan jalan, pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan bagi takjil dan dapur air.

(Ria)-f

PAWARTA SILATURAHMI DENGAN WAGUB DIY

Dukung Turnamen Golf Diaspora Yogya

YOGYA (KR) - Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X menerima audiensi dari Paguyuban Warga Yogya di Jakarta (Pawarta), di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Selasa (11/3). Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Pawarta Heru Purnomo didampingi jajaran pengurus lainnya. Dalam pertemuan tersebut mereka menyampaikan rencana bahwa paguyuban (Pawarta) akan kembali mengadakan turnamen Pawarta Golf yang memperebutkan piala Paku Alam X.

"Turnamen golf kali ini akan diadakan oleh Paguyuban Warga Yogya di Jakarta, bekerjasama dengan Diaspora Kota Yogya. Pawarta sendiri sudah terbentuk sekitar dua puluh tahun yang lalu, dengan anggota aktif sebanyak 80 dari seluruh anggota yang tercatat sebanyak 400 orang. Adapun tahun ini, adalah tahun ketiga penyelenggaraan Pawarta Golf," kata Heru Purnomo.

Menurutnya, kegiatan Pawarta Golf rencana akan diadakan pada bulan April 2025. Namun, melihat situasi sekarang, ada kemungkinan pelaksanaan turnamen akan mundur. Walaupun begitu pihaknya menegaskan, bahwa turnamen golf akan tetap dilaksanakan pada tahun ini.

"Sri Paku Alam X menyambut baik adanya turnamen Pawarta Golf. Wagub berharap lewat kegiatan turnamen golf diharapkan dapat mempererat semua komunitas warga Yogya atau diaspora yang ada di Jakarta," ungkapnya. **(Ria)-f**

Pengda Kota Yogyakarta IPPAT Siap Memberikan Pelayanan Digital



KR-Devid Pernama

Pengurus IPPAT Kota Yogyakarta di sela pelantikan.

YOGYA (KR) - Pengurus Daerah (Pengda) Kota Yogyakarta Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) masa bakti 2024-2027 dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Pengurus Wilayah DIY IPPAT Agung Hening Indrardi Prajanto SH MHum di The Malioboro Hotel & Convention Center, Yogyakarta, Senin (10/3).

Setelah pelantikan, digelar Sosialisasi Implementasi Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik oleh IPPAT Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Pusdatin Kementerian ATR/BPN RI dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Dilanjutkan buka puasa bersama instansi mitra seperti BPKAD Kota

Yogyakarta, KPP Pratama Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Ketua Pengda Kota Yogyakarta IPPAT, Muhamad Firdauz Ibnu Pamungkas SH MH menuturkan bahwa saat ini eranya pelayanan digital, oleh karena itu semua PPAT di Kota Yogyakarta diharapkan siap memberikan layanan digital tersebut. "Semua PPAT harus melek teknologi dan harus cermat mulai dari awal pembuatan akta tanah sampai transaksi pembayaran SPS dan lainnya," terangnya.

Menurut Firdauz, guna meningkatkan keterampilan digital para anggotanya (PPAT), Pengda Kota

Yogyakarta IPPAT terus memberikan sosialisasi terkait layanan digital. Tak kalah penting, PPAT sendiri juga mesti menguasai digitalisasi, jangan hanya mendelegasikan tugasnya kepada karyawan.

"Kami (Pengda) juga terus mengingatkan agar PPAT selalu amanah dan berintegritas dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. PPAT harus peka siapa pengguna jasa kita, pastikan pihak itu memang benar-benar berwenang untuk mengalihkan hak atas tanah, dan benar-benar miliknya. Ini untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah," ujarnya.

Ketua Pengwil DIY IPPAT Agung Hening Indrardi Prajanto SH MHum mengucapkan selamat kepada segenap Pengda Kota Yogyakarta IPPAT masa bakti 2024-2027 yang telah dilantik, apalagi pelantikan dilakukan di Bulan Ramadan yang sangat mulia. "Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada para pengurus. Ini luar biasa, bagaimana pengurus mau meluangkan waktu dan beramal untuk organisasi dan anggota," katanya. **(Dev)-f**

WAKIL KETUA FRAKSI PARTAI NASDEM DWI CANDRA PUTRA Ujung Tombak dan Ujung Tombok, Sesuaikan Honor Pemangku Wilayah



KOTA YOGYAKARTA

Ketua TK PKK tingkat kelurahan sebesar Rp 150.000 per bulan per orang.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogya ini pun menjelaskan, pemangku wilayah khususnya RT dan RW hampir setiap hari berhadapan dengan warga. Berbagai program pemerintah tidak mungkin bisa berhasil jika tidak melibatkan para pengurus RT dan RW. "Apalagi pendataan sampah kemarin juga dititikberatkan melalui Ketua RT dan RW. Semua program pemerintah itu juga melibatkan RT dan RW, termasuk penyelenggaraan pemilu kemarin," tandasnya.

Oleh karena itu tingginya tingginya aktivitas dan tanggung jawab para pemangku wilayah tersebut, imbuh Dwi Candra, sudah sepatutnya pemerintah melakukan kajian atas honorarium. Terutama dengan mempertimbangkan ukuran kepantasan serta apresiasi atas pengabdian dan dedikasinya dalam menjadi mitra pembangunan di wilayah. Jika dinilai tidak memungkinkan menambah satuan honor dalam standar barang dan jasa, maka bisa melalui mekanisme lain seperti hibah, transport kegiatan maupun tanda jasa.

Apalagi peran para Ketua RT, RW serta aparaturnya lainnya cukup signifikan dalam mensukseskan program Hasta Jogja Mulia yang digaungkan Walikota dan Wakil Walikota Yogya, Hasto Wardoyo dan Wawan Harwaman. "Sudah menjadi ujung tombak keberhasilan program pemerintah di wilayah, ya mbok jangan terus-terus menjadi ujung tombok juga. Kami akan memberikan dukungan ketika ada usulan terkait hal itu," terang Dwi Candra. **(Dhi)-f**



KR-Ardhi Wahdan